

REFORMASI PENDIDIKAN MENUJU MASA DEPAN PEMBANGUNAN BANGSA

Oleh: Rosidah

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

Abstract

Global era is a challenge for seizing competitive quality among nations. The challenge become an agenda for realizing an education system able to answer some requirement for development. Education is the main pillar of development. Actually, functional decadence of education has occurred within erosion in the process of striking objective of education. Reformation is urgent, in terms of education system, the learning of education personal, the existence education personals. Reformation in the three elements should be synergic and progressing mission/visions for education leading to the purpose of human development, generating human who are intelligent, piety, scholarly, humanisitic, adabtive, indenpendent, moralized, fair, and populism. Some effort for realizing the objectives are the responsibility of government, schools and society. Thought this writing, it is discussed some issues of education reformations by converting aspects of institutions, profesionalism of education personals, and their relation to the future of nation development.

Key words: educations, reformation.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan proses humanisasi (memanusiakan manusia). Melalui pendidikan manusia dapat saling mengembangkan diri bersama orang lain. Dalam konteks itulah pendidikan hanya mungkin dipahami bila kebersamaan manusia dilihat sebagai sosok individual dan sosial secara

interaktif. Interaksi tersebut menyebabkan masalah investasi sumberdaya manusia tidak dapat dipisahkan dari kepentingan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Bentuk-bentuk praksis pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan, nilai-nilai, dan permasalahan identitas kebudayaan yang dianut. Pendidikan menjadi bagian dari proses kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan tidak lepas dari perubahan sosial suatu bangsa.

Pendidikan merupakan salah satu tugas pokok dari negara. Pemerintah berkewajiban untuk mengatur secara kelembagaan melalui sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Pembangunan bangsa dan perubahan masyarakat akan saling ketergantungan dengan program pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah/pemerintah daerah dalam mengantisipasi perkembangan di era global. Salah satu akibat dari globalisasi ialah adanya kemajuan sains dan teknologi yang pesat yang akan mengubah secara radikal terhadap tuntutan dunia pendidikan. Kemajuan teknologi menyebabkan pekerjaan-pekerjaan tertentu tidak diperlukan lagi, dan menuntut pekerjaan baru yang menuntut kecakapan baru. Mereka yang tidak mampu untuk menyesuaikan akan tersisihkan dan sekolah-sekolah bisa dikatakan ketinggalan. Untuk itu lembaga pendidikan harus melakukan perubahan terhadap proses pembelajaran yang antisipatoris terhadap perkembangan tuntutan global.

Perkembangan sains dan teknologi juga berimbas pada pasar tenaga kerja. Dalam jangka menengah/panjang, peningkatan mutu tenaga kerja hanya dapat dicapai melalui penyesuaian-penyesuaian program pendidikan nasional dengan kebutuhan pengembangan ekonomi global. Peningkatan mutu tenaga kerja merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional. Fungsi pendidikan di samping dapat memenuhi pasar tenaga kerja, juga harus dapat menanamkan kemampuan intelektual, spiritual dan emotional/sikap pada generasi muda untuk mencegah pendangkalan kehidupan. Karena gaya hidup modern akibat arus global mengandung ekses-ekses dekadensi moral, orientasi pendidikan harus mampu mengantisipasi akibat tersebut.

Pengaruh modernisasi lebih mendesak untuk diantisipasi apalagi kalau dikaitkan dengan kerawanan terhadap kehidupan masyarakat yang sedang mengalami masa transisi dari masyarakat feodal-agraris menuju ke

masyarakat demokratis-industrial. Proses kehidupan pada masa transisi tersebut banyak tata nilai yang belum mantap atau tidak ada patokan normatif. Proses pendidikan harus berpijak pada kebudayaan masyarakat dan jati diri bangsa. Oleh karena itu, upaya reformasi pendidikan tidak lepas dari persolan-persoalan peningkatan kehidupan masyarakat serta nilai-nilai kemanusiaan.

Pendidikan dapat dipandang sebagai transformasi kebudayaan, yaitu memindahkan nilai-nilai, pengetahuan, kearifan dan ketrampilan yang mengkristal dalam masyarakat dari masyarakat yang terdahulu ke masyarakat yang kemudian. Pendidikan, dikemukakan oleh ahli pendidikan, sebagaimana ditulis oleh The Liang Gie (1998: 44) merupakan “any process, formal or in formal, that helps develop the potentialities of human beings, including their knowledge, capabilities, behaviour patterns and values”. Dengan demikian, pendidikan mempunyai tugas pokok: mengembangkan sikap ilmiah, pemikiran ilmiah, nilai-nilai dan membentuk perilaku manusia bernalar untuk dapat berperan dalam dunia modern. Oleh karena itu, melalui pendidikan, pemerintah bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Pendidikan menjadikan manusia yang cerdas, berilmu, humanis, mandiri, bermoral, bertaqwa dan populis. Sementara itu, pendidikan mengalami dekadensi orientasi dalam mencapai tujuannya. Kecenderungan pendidikan hanya berorientasi untuk pemenuhan lapangan kerja. Sisi pembentukan karakter bangsa kurang mendapat sentuhan yang berarti. Pendidikan sering diartikan sebagai *transfser of knowledge*. Kalau demikian adanya, pendidikan hanya mampu mencerdaskan saja, belum sampai pada tujuan pendidikan sebagaimana termaktub dalam Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, “pendidikan berusaha mengembangkan potensi anak didik untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.

Kurikulum dengan berbagai perubahan dalam sajian materi pembelajaran belum optimal memenuhi tuntutan dalam memberi bekal bagi anak didik untuk bisa hidup mandiri dan adaptif dalam era global. Kenyataan menunjukkan bahwa angka pengangguran dari tahun ke tahun semakin

meningkat. Menurut pemberitaan Suara Pembaharuan, Senin 10 Juni 2002, jumlah pengangguran terdidik terus bertambah, diperkirakan setiap tahun jumlah penganggur akan bertambah 2,5 juta. ([www.nakertrans.go.id/berita mass media](http://www.nakertrans.go.id/berita/mass%20media)). Dari keterangan di atas maka untuk menuju masa depan pembangunan bangsa, reformasi pendidikan merupakan kebutuhan yang mendesak untuk dilakukan.

Profil Pembangunan Bangsa & Fenomena Pendidikan

Bangsa yang ingin maju adalah bangsa yang memperhatikan pendidikan. Pendidikan menjadi pilar utama dalam membangun bangsa di masa depan. Upaya pemerintah dalam peningkatan pendidikan sudah dinyatakan dalam misi GBHN 2003, yaitu: “pewujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketrampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia”. Cita-cita tersebut dapat diwujudkan melalui proses penyelenggaraan pendidikan. Sebagai implementasinya maka alternatif paradigma yang bisa dimunculkan dalam pendidikan antara lain bahwa: a) pendidikan sebagai proses mencerdaskan generasi pembangunan, b) pendidikan sebagai alat pembentukan moral, karakter, c) pendidikan sebagai alat pembentukan kesadaran bangsa, d) pendidikan sebagai alat mengangkat status sosial (Wahono, 2001: 2). Dalam hal ini maka pendidikan sebagai wahana dan pendidikan diabdikan untuk beberapa tujuan.

Paradigma pendidikan bisa berkembang seiring dengan perkembangan kebutuhan bangsa, yang dipengaruhi baik lingkungan internal maupun eksternal. Era global akan berpengaruh terhadap tuntutan pendidikan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi profil pembangunan bangsa masa depan. Profil pembangunan bangsa masa depan yang terkait dengan pendidikan, oleh Djohar (2001: 165) disebutkan antara lain: 1) pendidikan harus mampu menggerakkan kebangkitan intelektual peserta didik, 2) pendidikan harus mampu membangun kemandirian anak, 3) pendidikan harus mampu

membangun jati diri anak, 4) diversifikasi pendidikan yang menghasilkan unggulan, 5) diversifikasi pendidikan hanya dapat dikembangkan dengan adanya otonomi pendidikan. Apabila pembangunan bangsa dikaitkan dengan kualifikasi sumberdaya manusia, oleh Djohar (2001: 204) disebutkan antara lain: 1) bebas dari kebodohan, 2) mencerminkan manusia modern yang berbudaya, 3) memiliki motivasi untuk maju, 4) memiliki paradigma hidup perspektif, 6) memiliki etos kerja dan disiplin tinggi, 7) memiliki komitmen kebersamaan tinggi. Kriteria di atas harus menjadi standar atau orientasi dalam upaya reformasi.

Agar bangsa dapat survive dalam menghadapi era global maka kebangkitan pendidikan harus mampu menggerakkan potensi intelektual bangsa. Tidak hanya itu, untuk mengembangkan karakter perlu dikembangkan kecerdasan quantum (*Quantum Quotient*) yang meliputi tiga aspek: kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual (Agus Nggermanto, 2001:22). Kecerdasan intelektual berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran rasional, logis, dan matematis. Kecerdasan emosional berkaitan dengan emosi pribadi dan antar pribadi. Kecerdasan spiritual berkaitan dengan segala sesuatu melampaui intelektual dan emosional (faktor keagamaan).

Sudah tidak dapat dihindari lagi bahwa era global membawa perubahan-perubahan baru dalam pendidikan. Di era tersebut bangsa Indonesia akan masuk atau menjadi bagian penduduk bangsa di dunia. Agar di dalam komunitas global tidak terjadi gejolak budaya (*cultural shock*), generasi muda perlu dibekali/dibiasakan untuk melihat eksistensi bangsa dalam kaitan dengan komunitas bangsa lain dan persoalan-persoalannya. Melalui pendidikan perlu disadarkan kepada anak didik bahwa bangsa Indonesia tidak berdiri sendiri. Keselamatan dan kejayaan bangsa akan sangat dipengaruhi oleh bangsa lain di dunia. Oleh karena itu format pendidikan menyangkut pula upaya memberi kesadaran peserta didik untuk menanamkan kesadaran wawasan nasional, regional maupun kesadaran internasional.

Kesadaran wawasan regional/internasional akan berdampak pada proses modernisasi dan membawa implikasi pada pendidikan. Sebagai

bangsa yang mempunyai kepribadian maka harus mengantisipasi dan menolak jenis-jenis modernisasi yang tidak sesuai dengan karakter bangsa. Agar pendidikan melahirkan anak bangsa/generasi baru yang mampu menfilter pengaruh modernitas maka pendidikan harus bisa membentuk atau memberikan kearifan bangsa. Bidang-bidang keilmuan yang terkait dengan pembentukan karakter bangsa tentunya menjadi sorotan tajam dan dilakukan redefinisi terhadap eksistensinya untuk mengantisipasi arus modernisasi dan informasi yang telah berlangsung dalam perjalanan waktu menuju pada the world system.

Pendidikan harus menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi, baik secara intelektual maupun susila. Namun, di tengah pembicaraan tentang eksistensi pendidikan, dalam realitanya masih ada wacana bahwa masyarakat masih meragukan fungsi pendidikan dalam membentuk karakter bangsa. Buktinya, dalam birokrasi masih ada indikasi melakukan tindakan korupsi, masih ditemukan beberapa patologi birokrasi, banyak tindakan asusila, dan kriminal di masyarakat. Nampaknya terjadi dekadensi pendidikan dalam fungsinya sebagai kekuatan kultural dalam membentuk manusia pembangunan sesuai dengan Undang Undang Kependidikan No. 20 tahun 2003, Pasal 3:

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Orientasi pendidikan dalam implementasinya harus bersifat komprehensif, holistik untuk memenuhi hajat hidup manusia sosial yang tidak lepas dari komunitas global. Proses pendidikan perlu ada muatan-muatan yang bersentuhan dengan masalah perkembangan budaya, tata nilai, wawasan global, tanpa mengurangi arti bidang keilmuan yang menjadi spesialisasi keahlian.

Salah satu prinsip dasar pendidikan adalah pendidikan yang bisa mempersiapkan anak didik tidak hanya untuk memiliki suatu profesi tertentu tetapi meliputi pula pemahaman untuk menyelesaikan masalah-masalah

yang dihadapi dalam kehidupannya. Mochtar Buchori (2001: 51) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan harus mempersiapkan anak didik untuk menghadapi tiga tugas kehidupan: a) untuk dapat hidup (*to make a living*), b) untuk mengembangkan kehidupan yang bermakna (*to lead a meaningful life*), c) untuk turut memuliakan kehidupan (*to enable life*). Untuk masa depan, orientasi pendidikan tidak cukup pada memenuhi tuntutan pasar kerja, namun yang lebih penting lagi adalah bagaimana pendidikan menemukan kearifan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru akibat era industrialisasi dan informasi.

Berbagai persoalan pendidikan telah menuntut pengamat pendidikan untuk segera melihat kenyataan pendidikan yang telah berlangsung. Selama ini ada kesenjangan antara orientasi pendidikan yang cenderung untuk memenuhi pasar tenaga kerja dengan pembentukan dalam rangka memaknai hidup dan memuliakan hidup. Tidak salah kalau ada wacana bahwa kapitalisme pendidikan sedang berlangsung di Indonesia. Hal tersebut menjadi diskusi Wahono (2001:xi-xv) dalam buku "Kapitalisme Pendidikan Antara Kompetisi dan Keadilan "Masyarakat cenderung menganggap melalui pendidikan, masa depan akan cerah. Masyarakat mengalami ketidakseimbangan dalam proses pendidikan, yakni apa yang ingin dicapai melalui pendidikan dengan proses keterlibatannya dalam pendidikan. Kondisi tersebut oleh Kleden, sebagaimana dikutip Margono (1993:6) dalam makalahnya berjudul "Pengalaman Integratif Terhadap Misi Pendidikan Sebagai Pengembang Sumberdaya Manusia", dikatakan bahwa: "terdapat kesenjangan antara pengetahuan ilmiah manusia terdidik dengan sikap ilmiahnya sehari-hari. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara apa yang diinginkan/diharapkan dengan apa yang dilakukan".

Reformasi pendidikan perlu menyentuh persoalan-persoalan baru terkait dengan mempersiapkan peserta didik untuk bisa menjalani kehidupan dalam masyarakat mendatang yang penuh gejolak. Selama ini yang terjadi "orientasi pendidikan lebih pada keberhasilan hidup (*success in life*), akibatnya pendidikan sebagai komoditas" (Wahono, 2001: 6). Maka reformasi pendidikan perlu diarahkan tidak saja untuk keberhasilan hidup, tetapi meliputi juga memuliakan hidup (*to enabel life*). Kesuksesan dalam

profesi tertentu (misalnya: pengacara, pengusaha) belum tentu membawa pada kehidupan yang bermakna. Kehidupan yang bermakna merupakan hasil dari pengenalan diri sendiri, dan pengetahuan mengenai bagaimana menyatakan jati diri secara berarti dalam lingkungan kehidupannya di masyarakat. Untuk itu, dalam kurikulum perlu muatan materi yang bersentuhan dengan nilai-nilai kemanusiaan/keadilan sosial. Di samping itu perlu memikirkan pula pendekatan pembelajaran yang tepat untuk sampai pada pencapaian visi tersebut.

Upaya Reformasi Pendidikan

Fenomena pendidikan yang telah berlangsung memberikan inspirasi baru dalam perenungan kembali masalah pendidikan. Pendidikan di era industrialisasi menuju dan sampai pada pendidikan di era informasi membawa pemikiran untuk melakukan reformasi. Reformasi pendidikan mempunyai pengertian perbaikan terhadap pendidikan menuju pada perubahan yang diinginkan dalam upaya mencapai tujuan (Mochtar Buchori, 2001: 21). Reformasi ternyata diperlukan untuk mengubah sistem pendidikan yang mampu menciptakan kondisi tumbuhnya aktivitas berpikir yang kontekstual dengan persoalan hidup kini dan mendatang. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Federico Mayors dalam Laporan Tahunan Rektor UNY (2002: 8) : *The future is not fated, but will be fashioned by our values, thought, and action*". Oleh karena itu, reformasi pendidikan tidak saja mencari solusi untuk kondisi yang sekarang, namun juga mengantisipasi pendidikan yang mendatang karena persoalan hidup masa depan adalah hasil dari perubahan yang dilakukan pada masa sekarang.

Pendidikan merupakan wahana yang strategis untuk mencetak manusia yang berkualitas dalam memenuhi tantangan di era global dan mampu berkompetisi dengan bangsa lain. Penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab kemanusiaan dan strategi budaya dalam rangka mempertahankan perikehidupan umat manusia yang bermartabat. Upaya reformasi yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan pendidikan untuk memenuhi tuntutan masa depan bangsa dengan tatanan budaya yang populis

dan humanis, antara lain yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Kecenderungan paradigma hakekat pendidikan sebagaimana aliran konservatif (Wahono, 2001: vi) bahwa:

“Hakekat pendidikan adalah menjaga nilai-nilai yang ada dan mempertahankan nilai dan tradisi yang sudah dianut. Sementara berjalan juga aliran Eksperimentalis dan Behaviorisme, yang memandang bahwa pendidikan harus senantiasa membuat individu manusia untuk memiliki personal behaviour yang efektif sehingga menyesuaikan diri dengan perkembangan sistem politik dan struktur ekonomi”.

Oleh karena proses pendidikan tidak lepas dari pengaruh kepentingan politik, sosial, dan ekonom, kebijakan pendidikan harus ada kearifan dalam menentukan prioritas yang dipilih dalam pengambilan keputusan pendidikan. Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan reposisi peran pendidikan sebagaimana misi pendidikan yang diamanatkan dalam Garis Garis Besar Haluan Negara 2003, yaitu bahwa perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.

Banyak aspek yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mempengaruhi kualitas pendidikan Hal-hal yang mempengaruhi kualitas pendidikan, diantaranya: 1) *hard ware*: gedung, lab. perpustakaan, 2) *soft ware*: kurikulum, sistem pembelajaran, 3) *brain ware*: guru, pimpinan dan siapa yang terkait dengan bidang pendidikan (Basis, 2002: 62). Proses reformasi pendidikan harus meliputi seluruh elemen di atas sehingga terjadi sinergi yang membawa kearah perbaikan. Selama ini telah dilakukan perbaikan dan pembaharuan. Namun dalam menghadapi tantangan globalisasi ini perlu penekanan kembali terhadap kondisi yang sedang berjalan untuk dilakukan intervensi yang sungguh-sungguh oleh penentu kebijakan pendidikan.

Reformasi di bidang proses pembelajaran pendidikan tenaga kependidikan menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan mengingat di tangan para ahli pembelajaran tenaga kependidikanlah maka bisa

menghasilkan calon pendidik (guru/dosen) yang bermutu dan profesional. Tenaga kependidikan merupakan tulang punggung pembangunan bangsa. Implikasinya berimbas pada proses pembelajaran yang bermutu kepada generasi muda, penerus pembangunan. Pembelajaran tenaga kependidikan harus mengacu pada tingkat profesional dari calon pendidik yang menjadi tuntutan pada era global. Materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan profesional baik teoretis maupun teknis perlu pembaharuan dalam formulasinya. Apakah muatan substansi dari masing-masing bidang keahlian (kurikulum, struktur program, metode pembelajaran tenaga kependidikan dan pendekatan) sudah meliputi aspek-aspek yang dibutuhkan untuk mempersiapkan calon tenaga kependidikan yang siap pakai dalam menyongsong masa depan bangsa? Tentunya ini menjadi agenda reformasi yang sangat urgent.

Persoalan lain adalah masalah sertifikasi guru profesional. Pendekatan kompetensi tenaga kependidikan perlu memikirkan acountabilitas. Lembaga mana yang sesungguhnya berwenang untuk memberikan jaminan mutu atas tingkat profesional seorang tenaga kependidikan? Hal tersebut akan berkaitan dengan lembaga pemakai (*user*), asosiasi/organisasi profesi. Sertifikasi harus jelas menunjukkan kualifikasi keahlian yang dimiliki oleh calon guru, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sertifikasi juga mencerminkan standar mutu yang diharapkan, baik pada level nasional maupun internasional. Nampaknya penting dilakukan redefinisi guru profesional dan penentuan *standard/indikator* profesional guru, baik tingkat nasional maupun internasional yang selanjutnya akan berpengaruh dan ditindaklanjuti pada proses pembelajarannya.

Untuk penjaminan mutu, pemilikan sertifikasi tersebut tidak berlaku selamanya, ada jangka waktu untuk diperbaharui. Seiring dengan pembaharuan sertifikasi, dilakukan pula tes kompetensi terhadap berbagai kemampuan yang terkait dengan pembelajaran. Jika pada periode waktu tertentu tenaga kependidikan yang bersangkutan tidak memenuhi standar kompetensi untuk jenis ketrampilan tertentu, diberikan pelatihan-pelatihan, yang akhirnya sampai pada pemenuhan standar yang dibutuhkan dalam pasar global. Mengacu pada pemikiran Makmur Muis (1997: 35) dalam

makalahnya: "Standar Kompetensi Nasional Bermuatan Internasional", tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pasar global meliputi: 1) mempunyai kualitas dan berdaya saing tinggi, 2) mampu melakukan pengembangan dan inovasi: inisiatif, kreatif, percaya diri, tanggung jawab, mobility, loyal terhadap organisasi.

Sehubungan dengan akuntabilitas dan profesionalisme tenaga kependidikan, inovasi terhadap eksistensi tenaga kependidikan menjadi kajian yang serius. Pemikiran Sarason (Joy A Palmer, 2003: 251) dalam *Teaching as a Performance Art* bahwa mengajar adalah seni pertunjukan (*performance art*), melibatkan keterikatan langsung, dramatis dan membangkitkan anak didik, tidak sekedar dengan pendukung komputer. Sarason (2003: 252) merekomendasikan bahwa "pendidikan guru harus memperhatikan bakat profesional secara lebih cermat". Untuk itu pada rekrutmen calon pendidikan guru perlu melalui prosedur pemilihan yang melibatkan audisi. Selanjutnya, Sarason (2003: 251) menyatakan bahwa: "sungguh mustahil menciptakan kondisi belajar yang produktif bagi para murid bila tidak dimiliki guru yang profesional. Dari pemikiran Sarason tersebut terkandung pengertian bahwa reformasi pendidikan juga melibatkan pada lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Dalam tulisan lainnya: *The Predictable Failure of Educational Reform* (Joy Palmer, 2003: 250), Sarason menyatakan bahwa usaha perubahan pendidikan tidak diselesaikan terpisah antara kepemimpinan, kurikulum, strategi mengajar dan organisasi. Jika reformasi terhadap elemen tersebut dilakukan secara terpisah, kegagalan yang mungkin terjadi.

Hal yang terkait dengan persoalan di atas adalah masalah rekrutmen tenaga kependidikan. Kerjasama antara Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan dinas pendidikan perlu dibina secara *intens*, kaitannya dengan kemungkinan perubahan nama program studi/jurusan ataupun informasi kebutuhan tenaga kependidikan ataupun peningkatan penelitian pendidikan. Kerjasama tersebut juga untuk mengantisipasi adanya *gap* atau *persepsi* yang berbeda antara bidang keilmuan yang dibutuhkan dinas pendidikan dengan bidang spesifikasi *out put* (lulusan) LPTK. Ketidakjelasan dan kerancuan tersebut akan berdampak pada rekrutmen

tenaga kependidikan yang akhirnya menjadi masalah dalam alokasi tenaga yang dibutuhkan.

Di sisi lain pemerintah maupun pihak penentu kebijakan pendidikan baik lembaga sekolah/ perguruan tinggi harus lebih peduli terhadap profesi tenaga kependidikan. Karena masa depan bangsa, salah satunya membutuhkan sentuhan tenaga kependidikan yang pandai dan profesional. Mereka mempunyai kewajiban dan mengantarkan anak bangsa untuk membangun bangsa yang bermartabat tinggi. Kepemimpinan pemerintahan, khususnya dalam bidang kependidikan perlu mengkaji kembali betapa besar peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan dan profesi tenaga kependidikan. Bentuk kepedulian pada tenaga kependidikan melalui peningkatan kesejahteraannya, jaminan pengembangan karir maupun melalui perbaikan bantuan untuk peningkatan fasilitas pada lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi). Pada ujungnya akan menjadikan kebijakan pendidikan yang berpihak pada kepentingan pembaharuan pendidikan demi pembangunan bangsa.

Dalam kaitannya dengan pembangunan bangsa, saat ini berkembang paradigma pendidikan yang berorientasi pada pendekatan peningkatan sumber daya manusia (SDM). Agar selaras dengan apa yang menjadi tuntutan di bidang pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional dan spiritual dalam upaya menjadikan manusia yang cerdas, bersusila dan mandiri maka istilah 'peningkatan sumber daya manusia' dalam konteks pendidikan nampaknya dipandang kurang sesuai. Karena dengan istilah tersebut terkandung bahwa manusia disamakan dengan sumberdaya yang lain (mesin, capital) dalam unit produksi. Terkait dengan penggunaan formulasi 'peningkatan sumber daya manusia' Wahono (2001: 90) mengatakan bahwa manusia tidak bisa disamakan dengan barang komoditi dan diperlakukan sama dalam maksimalisasi *output*. Jika menggunakan pendekatan tersebut, berarti menghitung keuntungan pendidikan dari sisi ongkos investasi uang dan hasil upah/gaji yang diterima oleh peserta didik ketika masuk dunia kerja. Pendekatan tersebut perlu diluruskan dengan istilah pendekatan pendidikan sebagai "pemberdayaan manusia". Pemberdayaan (*empowerment*) berarti bahwa manusia adalah otonom,

potensinya bisa dikembangkan. Pendidikan dan sistemnya berorientasi untuk memberdayakan manusia dengan segala kemampuan dan potensinya.

Pemakaian istilah pendidikan adalah upaya 'peningkatan' sumber daya manusia, pada akhirnya akan mengarah pendidikan juga sebagai suatu komoditas yang dapat diperdagangkan. Implikasi selanjutnya adalah adanya kapitalisme pendidikan. Pendidikan hanya akan mengarah pada tujuan ekonomi kapitalis, pendidikan ibaratnya sebagai pabrik tenaga kerja. Kapitalisme pendidikan akan mengarah pada kondisi sekolah mahal, kompetisi lembaga pendidikan yang tidak sehat. Pendidikan telah mengalami erosi perannya, yang dapat menjurus pada dekadensi fungsi pendidikan. Hal ini akan bertentangan dengan apa yang menjadi visi pendidikan, antara lain bahwa pendidikan adalah untuk rakyat.

Penutup

Pendekatan strategis untuk membangun bangsa adalah melalui pendidikan. Fenomena pendidikan yang berlangsung memberikan indikasi yang kurang sehat, pendidikan belum optimal dalam menghasilkan manusia pembangunan yang dicita-citakan. Dalam realitas terjadi dekadensi fungsi pendidikan sehingga timbul wacana bahwa pendidikan merupakan komoditi, pendidikan menuju pada kapitalisme pendidikan. Oleh sebab itu, upaya reformasi pendidikan yaitu dikembalikannya fungsi pendidikan pada misinya, sebagaimana termaktub dalam Undang Undang RI NO. 20 tahun 2003. Upaya reformasi pendidikan meliputi: 1) pengembangan standar pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan suatu badan standardisasi, penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, 2) pendidik mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Daftar Pustaka

Agus Nggermanto. 2002. *Quantum Quotient*. Bandung: Nuansa Cendekia.

Basis, Pendidikan Meningkatkan Ketidakadilan, Volume 07-08. 2002.

Departemen Pendidikan Nasional UNY. 2002. *Laporan Tahunan Rektor UNY pada Dies Natalis XXXVII*. Yogyakarta: UNY.

Djohar. 1999. *Reformasi dan Masa Depan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta

Mochtar Buchori. 2001. *Pendidikan Antisipatoris*. Yogyakarta: Kanisius

Palmer. 2003. *50 Pemikir Pendidikan*. Jogjakarta: Jendela.

Sutan Makmur Muins. 1997. "Standar Kompetensi Nasional Bermuatan Internasional", *Manajemen Pembangunan*, No. 21/V/1997.

The Liang Gie. 1998. *Pendidikan Ilmu Di Indonesia Sebuah Saran*. Yogyakarta: Pubib.

Undang Undang Republik Indonesia NO. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bandung: Citra Umbara.

[www.nakertrans.go.id/berita mass media](http://www.nakertrans.go.id/berita%20mass%20media).

Wahono. 2001. *Kapitalisme Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar